

**ANALISIS SUMBERDAYA PESISIR YANG BERPOTENSI SEBAGAI
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BENGKULU**

TUGAS AKHIR

Oleh :
HENNI SEPTA
L2D 001 426



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

ABSTRAK

Perencanaan wilayah mencakup dua hal yaitu perencanaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas dalam wilayah. Pelaksanaan kedua hal tersebut membutuhkan dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang cukup memadai agar dapat berjalan lancar. Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, setiap daerah dituntut kemandiriannya dalam penyelenggaraan pembangunan daerahnya dengan mengandalkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Hal tersebut merupakan tantangan bagi daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang terbatas seperti halnya Kota Bengkulu. Keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki Kota Bengkulu menyebabkan kota ini sangat bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat, sedangkan salah satu persyaratan kota yang dinilai mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, dimana tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin kecil dan pendapatan asli daerah menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Kota Bengkulu harus mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari potensi lokal daerahnya guna menunjang kemandirian Kota Bengkulu dalam pembangunan dan pengembangan wilayahnya pada masa otonomi daerah ini dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya pesisir sebagai salah satu potensi daerahnya.

Kondisi geografis Kota Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Bengkulu merupakan kawasan pesisir yang memiliki sumberdaya pesisir yang cukup memadai diantaranya sumberdaya perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, potensi pertambangan bahan galian golongan C serta jasa-jasa lingkungan seperti potensi pariwisata dan pelabuhan laut. Potensi sumberdaya pesisir tersebut berpotensi dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah berupa pajak, retribusi dan usaha daerah melalui usaha pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pesisir. Sejauh ini, usaha pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pesisir yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah belum optimal, hal tersebut dapat diketahui dari kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Bengkulu masih rendah dan tingkat pemanfaatannya hanya sebagian kecil dari potensi lestari yang tersedia, contohnya sumberdaya perikanan. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan, ketersediaan potensi lestari sumberdaya perikanan di Kota Bengkulu setiap tahunnya diperkirakan mencapai 80.072 ton tetapi baru dimanfaatkan sekitar 20% dari potensi lestari yang ada tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan kemampuan ekonomi Kota Bengkulu untuk berotonomi, diperlukan kajian analisis sumberdaya pesisir yang berpotensi sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Bengkulu yang bertujuan mengetahui sumberdaya pesisir Kota Bengkulu yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Metode pendekatan studi penelitian ini bersifat campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan teknik analisis AHP. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya analisis keterkaitan pengembangan sumberdaya pesisir terhadap pendapatan asli daerah, analisis usaha pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pesisir yang berpotensi dikembangkan sebagai usaha daerah Kota Bengkulu, analisis usaha pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pesisir yang berpotensi dikembangkan di Kota Bengkulu, analisis pajak dan retribusi daerah dari usaha pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pesisir yang berpotensi diberlakukan di Kota Bengkulu serta analisis sumberdaya pesisir yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hasil kajian analisis penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya pesisir yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah berupa pajak, retribusi dan usaha daerah melalui usaha pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pesisir adalah perikanan, pertambangan bahan galian C, pariwisata dan pelabuhan. Adapun berdasarkan prioritasnya, sumberdaya pesisir yang berpotensi tinggi dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Bengkulu saat ini adalah potensi sumberdaya perikanan.

Kata kunci : Pajak, Retribusi, Usaha Daerah, Potensi, Sumberdaya Pesisir, AHP.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan otonomi berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pada dasarnya memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak-lanjut dari kebijakan otonomi juga memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali potensi lokal daerahnya yang dinilai dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerahnya. (Tambunan, 2002).

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua kebijakan tersebut, menuntut setiap daerah harus mampu melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata, bertanggung jawab dan mampu mengatur pembiayaan pembangunan daerahnya sendiri. Salah satu ciri daerah yang mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin kecil sedangkan peran pendapatan asli daerah menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pembangunan daerah. (Yuliati dalam Halim, 2002:22).

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah sebagai dana penyokong pembangunan sangat penting guna menunjang kemandirian daerah sebagai daerah otonom dalam upaya pembangunan dan pengembangan wilayah dan kota. Namun di sisi lain, saat ini sebagian besar daerah di Indonesia memiliki nilai pendapatan asli yang masih rendah, bahkan ada beberapa kota yang memiliki nilai pendapatan asli daerah jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana perimbangan pusat. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan daerah terhadap dana bantuan pemerintah pusat sangat tinggi dalam pembiayaan pembangunan. Berdasarkan salah satu penelitian mengenai tingkat daya saing kota-kota di Indonesia, diungkapkan bahwa tingkat perekonomian dan penerimaan daerah beberapa daerah di Indonesia masih sangat rendah. Daerah-daerah tersebut sebagian besar terletak di wilayah Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk daerah yang terletak di wilayah Indonesia bagian barat sebagian besar merupakan daerah yang cukup makmur dengan nilai pendapatan asli daerah cukup memadai, meskipun ada juga di antara daerah-daerah tersebut yang

memiliki nilai pendapatan asli daerah sangat kecil dan daya saingnya secara ekonomi terhadap kota-kota lainnya sangat rendah, salah satunya adalah Kota Bengkulu.

Kota Bengkulu yang berfungsi sebagai ibukota dari Propinsi Bengkulu merupakan kota kecil yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera. Sejauh ini, Kota Bengkulu telah berupaya membangun berbagai infrastruktur perkotaan guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya. Hal ini dapat diketahui dari perubahan secara fisik wajah Kota Bengkulu setiap tahunnya menjadi lebih baik. Meskipun demikian, perkembangan kemajuan kota ini terkesan sangat lamban jika dibandingkan dengan ibukota propinsi tetangganya yang berada di Pulau Sumatera seperti Palembang, Padang dan Bandar Lampung. Dimana pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kota Bengkulu dinilai cukup jauh tertinggal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya dikarenakan masalah keuangan yang dialami oleh Kota Bengkulu yaitu berkaitan dengan keterbatasan dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data realisasi penerimaan daerah Kota Bengkulu tahun 2003, diketahui bahwa nilai pendapatan asli daerah Kota Bengkulu sangat kecil, jika dibandingkan dengan dana perimbangan pusat, nilainya hanya mencapai $\pm 5\%$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.1.

TABEL 1.1
REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2002/2003

JENIS PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN (Rupiah)
A. Penerimaan daerah	158.678.381
1. Bagian sisa lebih perhitungan tahun lalu	3.944.117
2. Bagian asli pendapatan asli daerah	6.801.493
2.1 Pajak Daerah	3.377.391
2.2 Retribusi Daerah	2.210.364
2.3 Bagian Laba BUMD	1.213.737
2.4 Pendapatan lainnya	-
3. Bagian dana perimbangan	138.471.533
3.1 Bagi hasil pajak	7.401.934
3.2 Bagi hasil bukan pajak	37.132.860
3.3 Dana alokasi umum	129.370.000
3.4 Dana alokasi khusus	1.662.466
3.5 Penerimaan lainnya	9.461.237
4. Bagian pinjaman pemerintahan daerah	
4.1 Pinjaman dalam negeri	-
4.2 Pinjaman luar negeri	-
B. Bagian urusan kas dan perhitungan	11.018.572

Sumber : *Bengkulu Dalam Angka 2003*. Kantor BPS Kota Bengkulu.

Berlakunya otonomi daerah, menuntut Kota Bengkulu untuk siap berkembang sebagai daerah otonom yang mandiri dengan keterbatasan dan kemampuan keuangan daerah yang seadanya. Oleh karena itu, untuk menunjang Kota Bengkulu sebagai daerah otonom yang mampu berkembang secara mandiri, masalah keuangan yang dialami Kota Bengkulu seharusnya dapat dikurangi bahkan diselesaikan dengan meningkatkan nilai pendapatan asli daerah. Salah satu cara yang berpeluang dilakukan diantaranya dengan menggali sumberdaya lokal daerah yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah, mengingat peranan pendapatan asli daerah sangat penting untuk mengurangi ketergantungan kota ini terhadap bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan kondisi geografis Kota Bengkulu yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera, salah satu potensi daerah yang cukup berpeluang dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah adalah potensi sumberdaya pesisir. Kota Bengkulu memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan luas laut territorial 53.000 Km² dan luas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 685.000 Km² yang membentang kearah laut lepas (ZEE 200 Mil). Wilayah pesisir Kota Bengkulu yang meliputi perairan pantai dan kelautan diperkirakan memiliki luas potensi ±194.596,4 Km² untuk perikanan tangkap dan budidaya (payau dan laut). (Profil kota di Indonesia, 2002). Potensi sumberdaya perikanan merupakan salah satu potensi sumberdaya pesisir yang menjadi andalan bagi Kota Bengkulu saat ini, dimana sumberdaya perikanan merupakan sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Bengkulu dari tahun ke tahun dibandingkan sub sektor pertanian lainnya. Selain potensi sumberdaya perikanan, Kota Bengkulu juga memiliki potensi sumberdaya pesisir lainnya seperti potensi pariwisata pesisir, jasa pelabuhan, pertambangan dan energi berupa bahan galian golongan C, hutan bakau, hutan mangrove, terumbu karang dan lain-lain. Sejauh ini, sebagian besar dari potensi tersebut telah dimanfaatkan dan dikembangkan melalui usaha pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pesisir, namun belum optimal sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Bengkulu dinilai masih rendah dan belum maksimal.

Sumberdaya pesisir yang dimiliki Kota Bengkulu berpotensi dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah seperti kota-kota lainnya di Indonesia. Salah satu contohnya kota-kota di wilayah pantura Pulau Jawa seperti Kota Jepara, Rembang, dan Tegal. Pengembangan sumberdaya pesisir di beberapa kota tersebut dilakukan melalui usaha pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pesisir yang berpotensi sebagai sumber pendapatan asli daerah dan memiliki peluang pasar yang cukup besar. Selain itu, seiring berjalannya waktu dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan permintaan barang dan jasa yang hampir tidak dapat dipenuhi lagi dari hasil-hasil pendayagunaan sumberdaya daratan menyebabkan pengembangan potensi ekonomi pesisir saat ini cukup diprioritaskan dan sebagai konsekuensinya tuntutan untuk